

## **PERLAKUAN AKUNTANSI BERDASARKAN PENERAPAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (ETAP) DALAM MENUNJANG KEWAJARAN LAPORAN KEUANGAN UD. X DI BALI**

**Clara Sarchan Indrawan**

Akuntansi/Fakultas Bisnis dan Ekonomika

[clarasarchan@gmail.com](mailto:clarasarchan@gmail.com)

**Dosen Pembimbing :**

**Drs. Eko Pudjolaksono, M.Ak., Ak., CA.**

**Intisari** - Sebagian besar pelaku UMKM masih memiliki kendala dalam hal keterbatasan pengetahuan mengenai akuntansi dan kemalasan pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai SAK ETAP karena sudah puas dengan bisnis yang dimilikinya dan sudah merasa cukup atas informasi keuangan yang seadanya dalam bisnisnya. Kondisi juga terjadi pada UD. X, sebuah UMKM yang bergerak dalam bidang distributor alat elektronik yang terletak di Bali. Meskipun UD.X telah lama didirikan dan memiliki aktivitas bisnis yang memadai namun belum dapat menerapkan SAK ETAP dengan baik dalam penyajian laporan keuangannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *applied research* karena hasil penelitian ini dapat diterapkan oleh UD.X untuk meningkatkan kewajaran laporan keuangannya. Dari hasil penelitian penulis ditemukan bahwa terdapat beberapa perlakuan akuntansi UD.X yang belum sesuai dengan SAK ETAP yaitu dalam perlakuan akuntansi sediaan, aset tetap, pajak penghasilan, dan penyajian laporan keuangan lengkap yang berdasarkan SAK ETAP.

Kata Kunci : Perlakuan Akuntansi, SAK ETAP, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, Laporan Keuangan UMKM.

**Abstract** - Most SMEs still have problems in terms of lack of knowledge regarding accounting and laziness SMEs to prepare financial statements in accordance with SAK ETAP because it is satisfied with his business and had had enough financial information to improvise in his business. The condition also occurs at UD. X, an SME that is engaged in electronic equipment distributor located in Bali. Although UD.X has long been established and have adequate business activities but has not been able to follow SAK ETAP well in the presentation of financial statements. This study used a qualitative approach to applied research method for this study can be applied by UD.X to improve the fairness of financial statements. From the results of the study authors found that there are some who have not UD.X accounting treatment in accordance with SAK ETAP is the accounting treatment of inventory, fixed assets, income taxes, and the complete financial statements are based SAK ETAP.

Keywords : Accounting Treatment, SAK ETAP, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, Financial Statements SMEs.

## PENDAHULUAN

Di dalam situasi ekonomi yang kompetitif seperti sekarang ini, perkembangan UMKM dianggap sebagai suatu alternatif yang dapat digunakan untuk mengurangi beban berat yang sedang dihadapi perekonomian nasional dan daerah. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya.

Perkembangan sektor UMKM yang pesat menunjukkan bahwa terdapat potensi besar jika dikelola dan dikembangkan dengan baik. Namun di dalam perkembangan UMKM masih terdapat berbagai kendala, salah satunya yaitu penerapan manajemen yang profesional. Sistem pembukuan yang dibuat oleh UMKM tersebut sangat sederhana dan juga mengabaikan kaidah administrasi keuangan sesuai standar. Hal ini dikarenakan pengusaha UMKM memandang bahwa proses akuntansi tidak terlalu penting untuk diterapkan, sehingga pengelolaan laporan keuangannya terkesan apa adanya.

Pengusaha UMKM perlu diberikan pengetahuan mengenai pentingnya laporan keuangan di dalam menjalankan suatu bisnis. Pelaksanaan pembukuan tersebut merupakan hal yang sulit bagi UMKM karena keterbatasan pengetahuan mengenai akuntansi, rumitnya proses akuntansi, dan anggapan bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting bagi UMKM. Selain itu, terdapat berbagai macam keterbatasan lain yang dihadapi UMKM yaitu latar belakang pendidikan yang tidak memahami akuntansi atau tata buku, kurang disiplin dalam melaksanakan pembukuan akuntansi, serta tidak adanya dana yang cukup untuk mempekerjakan akuntan atau membeli *software* akuntansi untuk mempermudah pelaksanaan pembukuan akuntansi.

Sehingga pada tahun 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mengesahkan Standar Akuntansi untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) untuk mempermudah para pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangannya. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas

yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum ( *general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. SAK ETAP berlaku efektif per 1 Januari 2011 namun penerapan SAK ETAP sebelum tanggal efektif diperbolehkan. SAK ETAP ini lebih mudah dan tidak sekompleks SAK umum karena PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang mengadopsi *International Financial Reporting Standard* (IFRS) terlalu kompleks jika diterapkan oleh usaha kecil di Indonesia.

Namun, di dalam penerapannya masih banyak perusahaan UMKM yang masih belum melakukan pencatatan sebagaimana mestinya dan melakukan penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada SAK ETAP. Meskipun sesungguhnya prinsip-prinsip yang terdapat dalam SAK ETAP sangat penting diperhatikan agar pengelolaan bisnis UMKM lebih profesional dan diharapkan akan berkembang menjadi lebih besar di masa mendatang. Hal ini dikarenakan banyak para pelaku UMKM yang sudah merasa mapan dengan yang dimilikinya sekarang. UMKM cenderung puas dengan bisnisnya sekarang dan cenderung malas melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan bisnisnya. Padahal diperlukan peningkatan baik dari segi manajemen maupun keuangan dan profesionalitasnya agar mampu bersaing dan mengembangkan bisnisnya.

UD. X merupakan usaha yang bergerak dalam distributor alat-alat elektronik yang telah berdiri sejak tahun 1995. Di dalam sistem pencatatan akuntansinya, UD. X telah menyusun laporan keuangan dalam menjalankan bisnisnya karena pemilik dari UD. X pernah mengikuti pelatihan akuntansi. Namun, penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh UD. X belum sepenuhnya sesuai dengan SAK ETAP. Hal ini dikarenakan pemilik merasa laporan keuangan yang disusun telah cukup dengan hanya mencatat total pengeluaran, total pemasukan, jumlah sediaan, serta total piutang dan utang. Salah satu contohnya adalah dalam hal penyusutan aset, UD. X merasa tidak perlu untuk menentukan estimasi usia aset padahal UD. X memiliki cukup banyak aset yang seharusnya dilakukan penyusutan. Khususnya pada kendaraan, karena UD. X memiliki banyak kendaraan yang digunakan untuk melakukan pengiriman barang kepada pihak toko-toko dan konsumen langsung. UD. X sendiri memiliki 3 mobil

*pick up* dan 4 motor yang digunakan untuk melakukan pengiriman dalam kegiatan operasionalnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai Penerapan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) dalam Menunjang Kewajaran Laporan Keuangan UD. X di Bali agar sesuai dengan standar yang berlaku yaitu SAK ETAP dan nantinya dapat menjadi contoh bagi UMKM lain untuk menerapkan SAK ETAP dengan benar.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *alternative* atau kualitatif. Dilihat dari segi sumber data, studi ini termasuk dalam *field research* karena data yang disajikan adalah data primer yang langsung didapatkan dari pemilik dan karyawan UD. X.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksplanatori (*explanatory research*) karena memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai perlakuan akuntansi berdasarkan penerapan SAK ETAP dalam menunjang kewajaran laporan keuangan UD. X di Bali serta menjawab *research question* di bawah ini.

Dilihat dari segi manfaat, penelitian ini termasuk dalam penelitian terapan (*applied research*), karena melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang dapat berguna bagi UD. X di Bali, berupa perlakuan akuntansi yang tepat untuk penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.

Dilihat dari dimensi waktu, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian longitudinal karena berfokus ingin mengetahui implikasi terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan UD. X sebelum dan setelah diterapkannya SAK ETAP. Data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Data dalam penelitian ini difokuskan pada data yang tanggal 1 Januari 2015 hingga 31 Desember 2015 yaitu laporan keuangan terakhir UD.X.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Periode akuntansi pada UD. X dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. Proses pencatatan pada UD. X masih manual dan tidak menggunakan teknologi komputer, namun untuk persediaan pemilik telah menerapkan sistem *computerized* sehingga memudahkan dalam melakukan *stock opname*.

Sistem akuntansi UD. X dimulai pada saat terjadinya transaksi-transaksi (dimulai dari pembelian barang dagangan dan proses penjualan hingga pembayaran barang dagangan dan penggajian karyawan). Untuk penggajian dicatat pada dokumen-dokumen bukti transaksi yang dibuat oleh bagian administrasi dengan menggunakan software Microsoft Excel dan faktur penjualan masih dicatat secara manual. Sedangkan untuk faktur pembelian, akan dikirimkan oleh produsen yang bersangkutan dengan menggunakan fax atau e-mail. Kemudian bukti-bukti transaksi ini harus diotorisasi oleh pemilik.

Pembayaran oleh pelanggan langsung di toko biasanya menggunakan uang tunai atau dapat menggunakan kartu kredit/debit karena UD. X tidak menerima pembelian secara kredit. Sedangkan apabila pembayaran oleh *reseller* yang sudah lama biasanya menggunakan cek atau bilyet giro sedangkan untuk *reseller* baru biasanya harus melakukan transfer rekening bank terlebih dahulu sebelum barang yang dipesan akan dikirim. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya piutang tak tertagih.

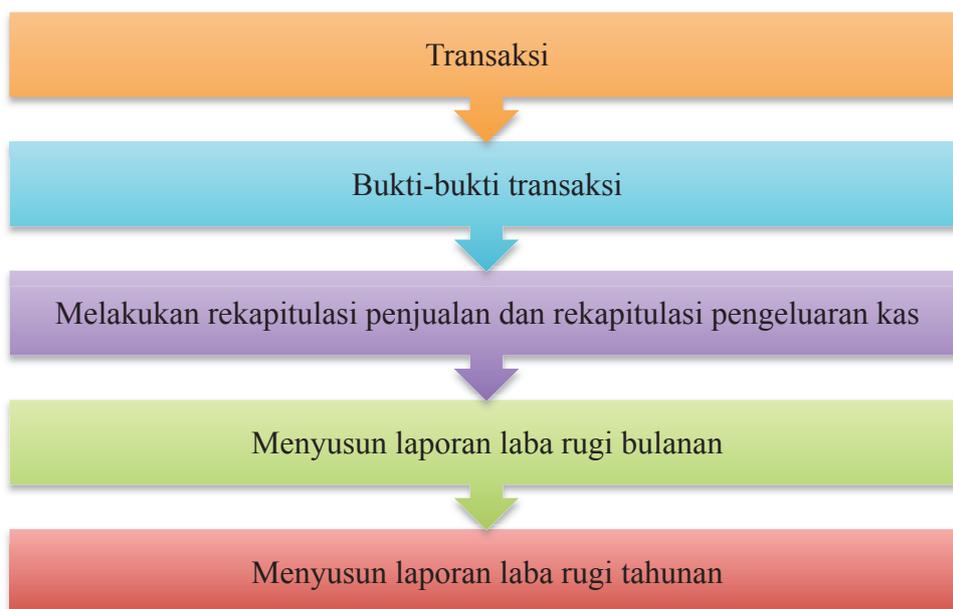
Pada akhir jam kerja, bagian administrasi akan melakukan rekapitulasi penjualan dan rekapitulasi pengeluaran kas. Rekapitulasi penjualan terdiri dari nama pelanggan, jenis barang, kuantitas barang yang dijual, nominal barang yang dijual, dan total penjualan. Rekapitulasi pengeluaran kas terdiri dari rekapitulasi biaya transportasi, rekapitulasi pembayaran gaji, dan rekapitulasi biaya perlengkapan. Sedangkan untuk rekapitulasi pembelian sediaan biasanya dilakukan setiap akhir bulan oleh pemilik.

Segala aktivitas yang berkaitan dengan sediaan UD. X dimasukkan oleh bagian administrasi ke dalam software persediaan yang dimiliki oleh UD. X. Sehingga memudahkan pemilik dan bagian penjualan dalam mengecek ketersediaan barang. Pemilik dapat melihat stock barang dengan mudah untuk

menentukan melakukan *restock* atau tidak dan bagian penjualan dapat lebih mudah dalam merespon permintaan pelanggan.

Pada akhir bulan, pemilik akan menyusun laporan laba rugi bulanan berdasarkan rekapitulasi penjualan dan rekapitulasi pengeluaran kas. Penyusunan laporan laba rugi bulanan ini bertujuan untuk melihat kenaikan atau penurunan laba bersih badan usaha pada bulan berjalan. Setelah periode akuntansi berakhir (31 Desember), pemilik akan merekapitulasi seluruh laporan laba rugi bulanan untuk menyusun laba rugi tahun berjalan. UD. X hanya menyusun laporan keuangan sampai laporan laba rugi saja dan tidak menyusun neraca dan laporan arus kas.

**Gambar 1**  
**Siklus Akuntansi pada UD. X**



Sumber : Data pemilik dan hasil observasi

Berikut perbandingan perlakuan akuntansi yang selama ini telah diterapkan oleh UD. X dengan perlakuan akuntansi yang diatur di dalam SAK ETAP:

**Tabel 5.1**

**Perbandingan antara perlakuan akuntansi UD.X dengan perlakuan akuntansi berdasarkan SAK ETAP**

Perlakuan Akuntansi	UD. X	SAK ETAP	Kesesuaian Perlakuan UD. X dengan SAK ETAP
Persediaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UD. X mengakui persediaan sebagai beban pada saat persediaan tersebut terjual.</li> <li>- UD. X menggunakan metode <i>first in first out</i> (FIFO) atau Masuk pertama keluar pertama (MPKP) dalam mencatat persediaannya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika sediaan dijual, maka jumlah tercatatnya diakui sebagai beban periode dimana pendapatan yang terkait diakui.</li> <li>- Entitas harus menentukan biaya sediaan dengan menggunakan metode MPKP atau rata-rata tertimbang. Metode Masuk Terakhir Keluar Pertama (MTKP) tidak diperkenankan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengakuan persediaan UD. X sudah sesuai dengan yang tertuang dalam SAK ETAP.</li> <li>- Pengukuran persediaan UD. X sudah sesuai dengan yang tertuang dalam SAK ETAP.</li> </ul>

<p>Aset Tetap</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh aset tetap UD. X memiliki manfaat ekonomi masa depan dan nilainya dapat diukur dengan andal.</li> <li>- UD. X memisahkan antara bangunan dan tanah dalam melakukan pencatatan.</li> <li>- UD. X tidak melakukan penyusutan terhadap aset tetap yang dimilikinya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SAK ETAP mewajibkan bahwa entitas harus mengakui biaya perolehan aset tetap sebagai aset tetap jika ada manfaat ekonomi masa depan dan nilainya dapat diukur dengan andal.</li> <li>- SAK ETAP menyebutkan bahwa tanah dan bangunan merupakan aset yang dapat dipisahkan dan harus dicatat terpisah, meskipun tanah dan bangunan tersebut diperoleh secara bersamaan.</li> <li>- SAK ETAP mewajibkan entitas mengukur aset tetap setelah pengakuan awal pada biaya perolehan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengakuan aset tetap UD. X sudah sesuai dengan yang tertuang dalam SAK ETAP.</li> <li>- Pengakuan aset tetap UD.X untuk tanah dan bangunan sudah sesuai dengan yang tertuang di dalam SAK ETAP.</li> <li>- Pengukuran aset tetap UD. X belum sesuai dengan yang tercantum dalam SAK ETAP sehingga</li> </ul>
-------------------	--	--	---

	<p>- UD. X hanya mengungkapkan informasi mengenai tahun perolehan dan biaya peroleh dari aset tetap yang dimilikinya.</p>	<p>dikurangi akumulasi penyusutan.</p> <p>- SAK ETAP mewajibkan entitas mengungkapkan informasi mengenai aset tetap sebagai berikut : dasar pengukuran untuk menentukan jumlah tercatat bruto, metode penyusutan yang digunakan, umur manfaat, jumlah tercatat bruto, metode penyusutan yang digunakan, umur manfaat, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan serta rekonsiliasi jumlah tercatat</p>	<p>menyebabkan nilai buku aset tetap UD.X menjadi <i>overstated</i> karena tidak disusutkan.</p> <p>- Pengungkapan informasi aset tetap UD. X belum sesuai dengan yang diwajibkan oleh SAK ETAP.</p>
--	---	---	--

Pendapatan	-	<p>Nominal penjualan produk UD. X dapat diukur dengan andal, terdapat manfaat ekonomi masa depan setiap kali terjadi penjualan dan produk yang dijual menjadi milik konsumen sepenuhnya.</p> <p>Pengakuan pendapatan UD.X menggunakan accrual basis.</p>	<p>UD. X mencatat</p>	pada awal dan akhir periode.	<p>- SAK ETAP mewajibkan entitas mengakui pendapatan dari penjualan barang jika kondisi berikut terpenuhi : entitas mengalihkan risiko dan manfaat atas kepemilikan barang kepada pembeli , entitas tidak lagi memiliki kontrol atas barang yang telah dijual, jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal, serta ada manfaat ekonomi yang mengalir ke entitas melalui penjualan barang tersebut.</p> <p>- SAK ETAP mewajibkan</p>		<p>- Pengakuan pendapatan UD. X sudah sesuai dengan yang tertuang dalam SAK ETAP.</p> <p>- Pengukuran pendapatan</p>
------------	---	--	-----------------------	------------------------------	--	--	--

	<p>pendapatan baik yang sudah diterima pembayarannya maupun jumlah yang masih harus diterima.</p> <p>- UD. X hanya mengungkapkan informasi mengenai nominal pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penjualan.</p>	<p>bahwa entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima dan yang masih harus diterima.</p> <p>- SAK ETAP mewajibkan entitas mengungkapkan informasi mengenai pendapatan, akuntansi sebagai berikut : kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan dan jumlah setiap kategori pendapatan yang diakui.</p>	<p>UD.X sudah sesuai dengan yang tertuang dalam SAK ETAP.</p> <p>- Pengungkapan informasi pendapatan UD. X belum sesuai dengan yang diwajibkan oleh SAK ETAP.</p>
<p>Pajak Penghasilan</p>	<p>- UD. X tidak mengakui dan mengungkapkan besarnya pajak penghasilan di dalam laporan laba rugi.</p>	<p>- SAK ETAP mewajibkan entitas mengakui, mengukur, dan mengungkapkan kewajiban</p>	<p>- Perlakuan akuntansi pajak penghasilan UD. X belum sesuai dengan yang diwajibkan oleh SAK</p>

			pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar.	ETAP.
Penyajian Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Keuangan UD.X hanya menyajikan laporan laba rugi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SAK ETAP mensyaratkan bahwa laporan keuangan entitas yang lengkap meliputi neraca, laporan laba rugi dan saldo laba, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyajian laporan keuangan UD.X belum memenuhi syarat penyajian laporan keuangan yang ditetapkan oleh SAK ETAP.</li> </ul>	
Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan laba rugi UD. X hanya berisi total pendapatan yang dikurangi dengan total beban (tidak termasuk beban pajak penghasilan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SAK ETAP mewajibkan entitas untuk menyajikan informasi sebagai berikut : saldo laba pada awal dan akhir periode serta penyajian kembali laba</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyajian informasi di dalam laporan laba rugi UD. X belum sesuai dengan yang diwajibkan oleh SAK ETAP karena komponen-komponen yang ada dalam</li> </ul>	

	<p>- UD. X tidak menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas selama periode pelaporan.</p>	<p>setelah koreksi kesalahan atau perubahan kebijakan.</p>	<p>laporan laba rugi masih memerlukan koreksi karena masih belum sesuai dengan SAK ETAP.</p>
--	--	--	--

Berikut merupakan dampak-dampak penerapan SAK ETAP terhadap penyusunan laporan keuangan UD. X di Bali :

- Perubahan yang pertama adalah penambahan informasi mengenai perubahan ekuitas UD.X. Menurut SAK ETAP, apabila perusahaan ekuitas hanya berasal dari laba atau rugi, perubahan akuntansi, dan dividen (dalam hal ini dikarenakan UD. X merupakan badan usaha perseorangan maka tidak terdapat dividen tetapi terdapat prive oleh pemilik) maka laporan perubahan ekuitas dapat digabungkan dengan laporan laba rugi menjadi laporan laba rugi dan saldo laba.
- Terdapat pada perubahan-perubahan komponen yang ada di dalam laporan laba rugi seperti pengelompokan beban menjadi beban usaha dan beban lain-lain, laba bersih sebelum pajak (laba kotor dikurangi beban usaha), dan laba bersih setelah pajak (laba bersih sebelum pajak dikurangi pajak penghasilan). Dalam laporan laba rugi UD. X sebelum diterapkannya SAK ETAP sangatlah sederhana yaitu hanya terdapat komponen laba bulan berjalan dan tahunan (total penjualan dikurangi total beban) dan laba tersebut belum dikurangi dengan pajak penghasilan.
- Sebelum penerapan SAK ETAP, UD. X menggunakan akun beban pembelian dan tidak dipisahkan dengan beban-beban lainnya. Sedangkan setelah penerapan SAK ETAP, akun beban pembelian diganti menjadi harga pokok pembelian sehingga memunculkan adanya komponen laba kotor dalam laporan laba rugi yang sebelumnya tidak terdapat pada laporan laba rugi UD.X.
- Dengan adanya penambahan beban penyusutan dan beban pajak penghasilan, laba bersih UD. X setelah diterapkannya SAK ETAP mengalami penurunan sebesar 57% dibandingkan dengan sebelum diterapkannya SAK ETAP.
- Nilai buku aset tetap UD. X mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 34,16% (Rp 501.727.083). Penurunan yang signifikan ini terjadi karena neraca yang disusun berdasarkan SAK ETAP ini telah memperhitungkan penyusutan pada aset tetap. Penurunan yang cukup material tersebut mempengaruhi kewajaran laporan keuangan UD. X. Setelah

diterapkannya SAK ETAP, laporan keuangan yang disajikan pada UD. X menjadi lebih wajar.

- Dengan menyajikan laporan arus kas dalam penyajian laporan keuangan karena sebelum diterapkannya SAK ETAP, UD. X tidak menyusun laporan arus kas. Laporan arus kas memberikan informasi penting mengenai penerimaan dan pembayaran kas suatu perusahaan selama satu periode serta untuk memberikan informasi atas dasar kas mengenai aktivitas operasi, investasi dan pendanaannya sehingga meningkatkan kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh UD.X dengan melihat arus kas keluar dan arus kas masuk berdasarkan aktivitasnya.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Sebagian besar perlakuan akuntansi UD.X sudah sesuai dengan SAK ETAP namun ada tiga perlakuan akuntansi UD.X yang masih belum sesuai dengan SAK ETAP. Pertama, perlakuan akuntansi aset tetap UD.X yang tidak melakukan penyusutan terhadap aset-aset tetap yang dimiliki UD. X. Kedua, perlakuan akuntansi pajak penghasilan yaitu dengan tidak dicantumkannya beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi UD. X. Ketiga, penyajian laporan keuangan UD.X yang hanya menyajikan laporan laba rugi saja dan tidak menyusun neraca, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

Terdapat perbedaan informasi antara sebelum diterapkannya SAK ETAP dan setelah diterapkannya SAK ETAP terhadap laporan keuangan UD.X. Pertama, laporan laba rugi terdapat penambahan informasi perubahan saldo laba, mengganti komponen beban pembelian persediaan menjadi harga pokok penjualan, mengklasifikasikan beban-beban UD.X dengan lebih detail, menambahkan beban pajak penghasilan yang sebelumnya belum dicantumkan, serta penambahan komponen seperti laba kotor, laba bersih sebelum pajak, dan laba bersih setelah pajak. Kedua, penyusunan neraca pada laporan keuangan UD.X, dimana sebelum diterapkannya SAK ETAP UD.X tidak menyusun neraca dalam laporan keuangan.

UD. X seharusnya mulai menerapkan pencatatan akuntansi yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yaitu SAK ETAP dalam penyusunan

laporan keuangannya untuk periode selanjutnya. Penerapan SAK ETAP memiliki banyak manfaat seperti mengetahui kinerja perusahaan, memudahkan dalam pengambilan keputusan, memudahkan pemisahan antara harta pemilik dan harta perusahaan karena mengetahui posisi keuangan badan usaha, memudahkan pengembangan bisnis karena lebih mudah untuk mendapatkan pendanaan dari bank.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Baas, T. dan M. Schrooten. 2006. Relationship Banking and SMEs: A Theoretical Analysis. *Small Business Economics*, 27.
- Belkaoui, Ahmed Riahi. 2006. *Teori Akuntansi*, edisi kelima. Salemba Empat : Jakarta.
- Darmadji, Stevanus Hadi. 2007. Prospek Pembentukan dan Sistem Akuntansi Bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Dalam *Kewirausahaan UKM : Pemikiran dan Pengalaman* , Yogyakarta : Graha Ilmu, hal 189-220.
- Efferin, S., S.H. Darmaji dan Y.Tan. 2008. *Metode Penelitian Akuntansi : Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Horngren, T. Charles. 2008. *Akuntansi Biaya Penerapan Manajerial Jilid 1*. PT. Indeks : Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Dewan Standar Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Kieso, E Donald and Weygand, Jerry J and Warfield, D Terry. 2014. *Intermediate Accounting: IFRS Edition*, 2<sup>nd</sup> Edition. Wiley : United States of America.
- Libby, Robert dan Short. 2008. *Akuntansi Keuangan*, edisi kelima. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Lubis, Arfan Ikhsan. 2010. *Akuntansi Perilaku*, edisi kedua. Salemba Empat : Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 Tentang *Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan*.

- Pujiyanti, Ferra. 2015. *Cara Cepat Menguasai Laporan Keuangan*. Lembar Pustaka Indonesia : Jakarta.
- Reeve, Carl S. Warren dan Jonathan E. Duchac. 2012. *Principles of Accounting – Indonesia Adpatation*. 2<sup>nd</sup> Edition. Cengage Learning : Canada.
- Shatu, Yahya Pud. 2016. *Kuasai Detail Akuntansi Laba dan Rugi*. Pustaka Ilmu Semesta : Jakarta.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik Teori, Konsep, Aplikasi*. Pustaka Baru Press : Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang *Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Warren, Carl. 2015. *Survey of Accounting*, 7<sup>th</sup> edition. South Western Cengage Learning.
- Warsono, S. dan E. Murti. 2010. *Akuntansi UMKM Ternyata Mudah Dipahami dan Dipraktikkan*. Yogyakarta: Asgard Chapter Winarno.
- Yong, Low Wong Yee dan Wang Aung Poh Hong. 2012. *Principles of Accounts*. Pearson Longman : Singapore.
- Zukarnain. 2015. Penerapan Metode Pengakuan Pendapatan Terhadap Kewajiban Laporan Keuangan pada BD Motor. *Jurnal Akuntansi Bisnis*. Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana. Jakarta.